IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) UNTUK KEWAJARAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO

JURNAL

MIMIN PAKAYA
NIM : D03422103

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) UNTUK KEWAJARAN PELAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO

Mimin Pakaya[1], Lukfiah Irwan Radjak[2], Felmi D. Lantowa[3]
[1]Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo,
Email: armi.221006@gmail.com

ABSTRACT

MIMIN PAKAYA. Implementation of the Institutonal Level Application System for Financial Reporting Fairness at the Regional Office of the Treasury Directorate General of Gorontalo Province. Supervised by LUKFIAH IRWAN RADJAK as Chairman and FELMI D LANTOWA as Member.

This research aims to determine the institutional level of financial application system implementation in the financial management process at the regional office of the treasury directorate general of Gorontalo province. This research uses a qualitative descriptive research method using observation and interview techniques. Checking the validity of the data uses triangulation with the source. The results showed of the 5 indicators used to measure the success of information system implementation for fair financial reporting, 3 indicators showed that the results are not optimal.

Keywords: ***Implementation, Institutional Level Financial Application System (SAKTI), Regional Office of the Directorate General of Treasury, Gorontalo Province***

ABSTRAK

MIMIN PAKAYA. Implementasi Sistem Aplikasi Tingkat Instansi (SAKTI) untuk Kewajaran Pelaporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Dibimbing oleh LUKFIAH IRWAN RADJAK sebagai Ketua dan FELMI D LANTOWA sebagai Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada proses pengelolaan keuangan pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pengecekan keabsahan data menggunakan trianggulasi dengan sumber. Hasil penelitian menunjukkan dari 5 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem informasi untuk kewajaran pelaporan keuangan, 3 indikator menunjukan hasil belum maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan *good governance* dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, *good governance* dapat tercapai.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 270/PMK.05/2014, pasal 3 menyebutkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan menggunakan aplikasi terintegrasi. Hal ini tentu saja belum dapat dipenuhi karena pada tahun 2015, pemerintah belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dalam proses pengelolaan keuangan. Sebagai catatan bahwa Aplikasi SAIBA merupakan aplikasi yang bersifat alat bantu dimana dalam penggunaannya masih harus menggunakan dukungan aplikasi lain seperti Aplikasi SIMAK BMN untuk pencatatan aset tetap, Aplikasi Persediaan untuk penatausahaan persediaan, dan aplikasi SAS untuk penatausahaan belanja dan pembayaran. Sehingga pada pasal 5 PMK tersebut dijelaskan pula mengenai ketentuan penggunaan aplikasi SAIBA sebagai alat bantu sementara.

Sebagai tindak lanjut atas keadaan di atas, dalam rangka pengembangan sistem aplikasi terintegrasi dalam pengelolaan keuangan negara, Pemerintah mulai mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan melakukan piloting sejak tahun 2015. Pelaksanaan piloting di Kementerian Keuangan dilakukan secara bertahap di beberapa satuan kerja dan pada akhirnya mulai pada periode pelaporan 2022 diterapkan ke seluruh satuan kerja.

Pengembangan ide SAKTI dibangun melalui penyederhanaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan negara yang digunakan sebelumnya. Aplikasi SAKTI mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi eksisting yang digunakan sebelumnya, seperti Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, Sistem Aplikasi Satker (SAS), dan Sistem Informasi Berbasis Akrual (SAIBA) menjadi satu kesatuan dalam aplikasi tunggal. Perlu diperhatikan juga terkait penelitian yang dikembangkan oleh (Novelia, 2023) yang menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas layanan mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna, SAKTI harus memperhatikan kualitas sistem khususnya *response time* dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan kinerja pengguna.

Implementasi SAKTI banyak memunculkan tantangan dan permasalahan. Diperlukan upaya sistematis seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga agar sistem ini dapat diterapkan dengan baik. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI pada tahap piloting awal. (Nasrudin & Widagdo, 2020) menyakatan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan fitur aplikasi yang rumit, sinyal internet yang tidak stabil, laporan yang belum bisa ditampilkan dengan utuh, pelatihan teknis yang minim, komunikasi admin dengan operator yang kurang, baik pusat dan daerah serta masalah-masalah lainnya.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam implementasi SAKTI. Permasalahan yang sering terjadi adalah proses perbaikan data/*maintenance* yang dilakukan oleh pusat sering terjadi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan beberapa transaksi tidak tersimpan namun tercatat pada laporan keuangan. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak valid akibat fitur *single entry point* pada SAKTI.



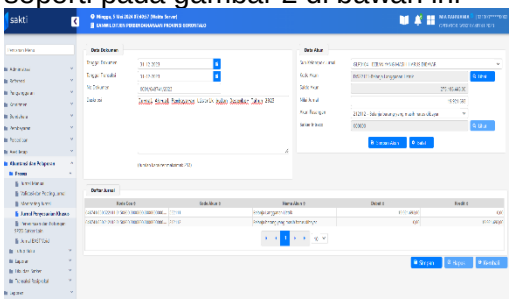
Sumber: DJPB Provinsi Gorontalo, 2024

Gambar 1 : Informasi Maintenance SAKTI

Selain itu, penerapan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual telah mengakui adanya beban pada laporan realisasi belanja saat melakukan perekaman SPM/Kontrak. Namun apabila SPM/kontrak tersebut ditolak oleh KPPN maka secara tidak langsung laporan realisasi belanja akan mengalami perubahan.

Tidak adanya *posting rules* yang jelas dan perekaman jurnal manual dalam pengakuan akrual pada beberapa transaksi serta kesalahan pemilihan kategori aset pada saat melakukan pencatatan berita acara

serah terima barang pada modul komitmen turut menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam implementasi SAKTI seperti pada gambar 2 di bawah ini



Sumber: DJPB Provinsi Gorontalo, 2024

Gambar 2 : Perekaman Jurnal Manual pada SAKTI

Selain daripada itu, atas hasil temuan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, hanya sekitar 16% proyek IT sektor Inggris yang bisa dinyatakan berhasil, sementara 84% lainnya mengalami kegagalan dalam berbagai tingkatan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh unsur *simplicity*, *certainly*, dan *stability* pada system yang kurang memadai serta rendahnya dukungan dan kompetensi dari pihak manajerial organisasi.

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan SAKTI menjadi prioritas yang harus diutamakan dalam inisiatif yang strategis. Perlu diketahui juga bahwa disamping itu Aplikasi SAKTI telah membantu pengguna meningkatkan produktivitas dan performa kerja, memudahkan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan (Pambudi & Adam, 2015).

Kendala dan tantangan dalam penerapan SAKTI dalam menyajikan laporan yang sesuai standar akuntansi pemerintah membuat penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang kewajaran laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan aplikasi SAKTI sekaligus menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul : "Impementasi Sistem Aplikasi Tingkat Instansi (SAKTI) untuk Kewajaran Pelaporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneitian yang berjudul: "Bagaimana implementasi Sistem Aplikasi Keungan Tingkat Instansi pada proses pengelolaan keuangan di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Kehadiran peneliti sendiri di lokasi penelitian diawali dengan melakukan observasi awal, turun langsung kelokasi penelitian untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Lokasi penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (*primer*). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (*sekunder*), dan dokumentasi seperti foto.

Teknik analisis data dengan menggunakan langkah-langkah oleh Menurut Bogdan & Biklen (Lexy J. Moleong, 2014) analisis data merupakan upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dengan data, mengumpulkan data, memisah data, mencari serta menemukan pola, menemukan suatu hal yang penting dan yang dibutuhkan, dan menentukan apa saja yang bisa diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan memilah terlebih dahulu seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Dengan mengecek keabsenan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Menurut Sugiyono (2015) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK. 05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, implementasi aplikasi SAKTI pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah diterapkan secara *full modulle* pada tahun 2022 sehingga peneliti merasa tidak perlu lagi dilakukan pengujian dan wawancara terhadap indikator Perencaaan, Pengembangan, Pengujian dan Peluncuran dikarenakan sudah tidak relevan lagi. Sehingga yang menjadi fokus penelitian terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi adalah

1. Evaluasi

   Evaluasi atas implementasi aplikasi SAKTI harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa aplikasi SAKTI masih berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan pengguna dan pemangku kepentingan. Evaluasi harus mencakup kinerja aplikasi, keamanan, dan kepuasan pengguna.
2. Pelatihan dan dukungan pengguna

   Selama dan setelah implementasi, penting bagi pengguna untuk menerima pelatihan yang memadai dan dukungan teknis yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi SAKTI dengan efektif. Pelatihan dapat berupa pelatihan langsung, panduan, video, atau sumber daya online lainnya.
3. Manajemen perubahan

   Manajemen perubahan dapat membantu memastikan bahwa implementasi sistem informasi berjalan dengan lancar dan bahwa pengguna dan pemangku kepentingan merasa nyaman dengan perubahan tersebut.
4. Pemeliharaan dan perbaikan

   Setelah implementasi, aplikasi SAKTI tentu memerlukan pemeliharaan dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan kinerja yang optimal dan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Pemeliharaan dapat mencakup pembaruan sistem, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan pembaruan data.
5. Kewajaran Laporan Keuangan

   Selain membahas 8 langkah yang digunakan untuk menilai keberhasilan implementasi aplikasi

SAKTI, penulis juga melakukan wawancara terkait laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi SAKTI itu sendiri apakah sudah sesuai standar akuntansi pemerintah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

LITERATURE REVIEW

Implementasi sistem informasi adalah salah satu tahap penting dalam siklus hidup pengembangan sistem informasi. Tahap ini melibatkan perencanaan, pengembangan, pengujian, dan peluncuran sistem informasi yang baru atau yang telah ditingkatkan. Untuk memastikan keberhasilan sistem informasi yang diimplementasikan dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah dibawah ini menurut Juansen, Guntur dan Prihandoko (2024) dan Chandra (2015), yaitu

1. Evaluasi

Menurut Hakam (2016), evaluasi sistem informasi yaitu suatu proses untuk menggali dan mencari tahu, tentang sejauh mana suatu kegiatan implementasi sistem informasi, baik dari sudut pandang persepsi pengguna, organisasi, maupun dari segi teknologi sistem informasinya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, penulis menemukan bahwa untuk menjaga keamanan data, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan suatu sistem intranet terpusat yang telah enkripsi yang hanya bisa digunakan dengan menggunakan email kedinasan masing-masing pegawai. Hal ini tentu dapat menjaga keamanan data dari lalu lintas jaringan internet yang selama ini menjadi momok menakutkan untuk aplikasi yang berbasis web.

Selain itu juga, dengan penerapan *fresh office* pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo seluruh pegawai sudah tidak menggunakan komputer namun telah dibagikan laptop kepada seluruh pegawai yang telah di join domain oleh kantor pusat sehingga antivirus yang telah terinstal dapat selalu update untuk melawan mallware dan virus komputer lainnya. Kemudian dengan pengamanan data yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka secara otomatis laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses evaluasi telah dilakukan dalam pengimplementasian aplikasi SAKTI dan telah dilakukan pencegahan-pencegahan untuk melindungi keamanan data sehingga kebutuhan pengguna akan laporan keuangan yang wajar telah terpenuhi.

2. Pelatihan dan dukungan pengguna

Selama dan setelah implementasi, penting bagi pengguna untuk menerima pelatihan yang memadai dan dukungan teknis yang diperlukan untuk menggunakan sistem informasi dengan efektif. Pelatihan dapat berupa pelatihan langsung, panduan, video, atau sumber daya online lainnya. Dukungan teknis dapat berupa dukungan telepon, email, atau melalui sistem tiket bantuan. Pelatihan dan dukungan yang baik dapat

membantu pengguna merasa nyaman dengan sistem dan mempercepat adopsi sistem.

Menurut peneliti terdahulu Ramdany, Yusuf Setiawan (2021) menyatakan bahwa kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam mengoperasikan aplikasi SAKTI tidak harus tinggi cukup namun, dengan kemampuan rata-rata SDM tersebut sudah dapat mengoperasikan dan memahami aplikasi SAKTI. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang telah dilakukan penelitian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dimana dari 9 (sembilan) responden selaku pemegang user pada aplikasi SAKTI, hanya 2 responden yang telah menerima pendidikan secara formal sedangkan sisanya hanya melalui pendidikan secara informal bahkan melakukan pembelajaran secara otodidak dengan melihat youtube ataupun petunjuk teknis yang ada sehingga masih terjadi penolakan SPM/Supplier/Kontrak akibat kesalahan perekaman transaksi serta kesalahan pencatatan kategori aset oleh operator komitmen. Dengan keterbatasan pelatihan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo masih dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pusat .

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguna aplikasi SAKTI pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo perlu mendapatkan pelatihan secara formal baik per modul yang merupakan tanggungjawabnya maupun untuk seluruh modul SAKTI agar pada saat terjadi mutasi internal, tidak akan terjadi permasalahan seperti penjelasan diatas sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat relevan dan andal. Selain pelatihan terkait aplikasi SAKTI, dalam pengoperasioan aplikasi SAKTI, pengguna dapat dibekali *posting rules* yang berlaku pada aplikasi SAKTI dalam bentuk buku untuk memudahkan pengguna dalam melakukan *tracking* transaksi apabila ditemukan anomali dalam laporan keuangan keuangan.

3. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan mengacu pada pendekatan atau metode implementasi untuk memastikan pencapaian perubahan dalam organisasi berhasil. Selain itu, untuk memastikan visi dan tujuan jelas, dan untuk memodifikasi sistem dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo ditemukan bahwa implementasi aplikasi SAKTI memberi dampak yang positif dalam pengelolaan keuangan negara sehingga laporan keuangan yang dihasilkan turut menjadi relevan dan dapat diandalkan. Integrasi berbagai macam aplikasi pengelolaan keuangan sebelumnya yang diterapkan pada aplikasi SAKTI memberikan kesan *simplifikasi* penyelesaian pekerjaan yang memudahkan proses penginputan, perekaman dan proses pencetakan data, tanpa harus menggabungkan ADK satu dengan yang lainnya.

4. Pemeliharaan dan perbaikan

Setelah implementasi, sistem informasi memerlukan pemeliharaan

dan perbaikan terus-menerus untuk memastikan kinerja yang optimal dan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang. Pemeliharaan dapat mencakup pembaruan sistem, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, dan pembaruan data. Perbaikan dapat berupa perbaikan masalah teknis dan perbaikan perangkat lunak. Penting untuk mengatur perencanaan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala untuk memastikan sistem informasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan bisnis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, aplikasi SAKTI sering dilakukan proses *maintenance* dengan tujuan agar aplikasi SAKTI ini dapat berjalan dengan optimal. Namun selama melakukan observasi dan wawancara kepada responden, penulis menemukan suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak valid. Permasalahan tersebut adalah dilakukannya suatu proses maintenance tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan adanya transaksi keuangan menjadi menggantung dimana transaksi tersebut tidak tersimpan pada histori transaksi namun pada laporan keuangan nampak. Selain itu pula, update aplikasi yang tidak memperhatikan kemampuan server atau aplikasi pendukung mengakibatkan aplikasi SAKTI menjadi *down*. Hal ini sama seperti temuan peneliti sebelumya yaitu Corry Margaretha Jayanti Gultom, Siti Nurwahyuningsih Harahap (2023) yang menyatakan bahwa adanya masalah konektivitas jaringan, respon sistem yang terkadang lambat dan seringkali *down* pada masa penyusunan laporan keuangan, serta hal teknis lainnya, mengurangi efektivitas SAKTI pada satuan kerja.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan koordinasi melalui hai.djpb@kemenkeu.go.id namun membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya sehingga penyajian laporan keuangan menjadi terlambat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pemeliharaan dan perbaikan sangat penting namun perlu diperhatikan bahwa proses maintenance tanpa pemberitahuan dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak valid.

5. Kewajaran Laporan Keuangan

Menurut Hendri (2020), Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD diatur

oleh (PP No 12 Tahun 2019). Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, standar akuntansi pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, laporan keuangan yang disajikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pusat walaupun masih diperlukan adanya penjurnalan secara manual dalam pengakuan transaksi akrual pada akhir tahun anggaran. Hal ini sesuai hasil peneliti terdahulu Praisya Mumu, Lintje Kalangi, Peter M Kapojos (2023) menunjukan dampak penerapan akuntansi berbasis akrual yaitu perubahan komponen laporan keuangan yang disajikan lebih rinci mengenai seluruh kegiatan oprasional keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, juga informasi mengenai asset dan penyusutan asset tetap sehingga informasi yang diberikan lebih mudah dipahami dan dimengerti, lebih relevan, andal dan dapat dibandingkan sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan ekonomi serta dapat memprediksi anggaran pada periode berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa laporan keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang dihasilkan dari implementasi aplikasi SAKTI telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pusat sehingga laporan keuangan tersebut dapat dikatakan wajar menurut PP 71 tahun 2010

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan bab sebelumnya tentang implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) untuk kewajaran pelaporan keuangan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dengan menurut menurut Juansen, Guntur dan Prihandoko (2024) dan Chandra (2015), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perencanaan, Pengembangan, Pengujian dan Peluncuran tidak dilakukan observasi sekaligus wawancana dikarenakan implementasi aplikasi SAKTI sudah dilaksakanan pada tahun 2022 sehingga keempat indikator tersebut sudah tidak relevan lagi dengan penelitian.
2. Evaluasi, proses evaluasi telah dilakukan dalam pengimplementasian aplikasi SAKTI dan telah dilakukan pencegahan-pencegahan untuk melindungi keamanan data sehingga kebutuhan pengguna akan laporan keuangan yang wajar telah terpenuhi
3. Pelatihan dan dukungan pengguna, pengguna aplikasi SAKTI pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo belum mendapatkan pelatihan secara formal namun penggunaan aplikasi SAKTI tidak mengalami hambatan dalam

pengoperasiannya sehingga laporan keuangan yang disajikan relevan dan andal.

4. Manajemen perubahan, implementasi aplikasi SAKTI memberi dampak yang positif dalam pengelolaan keuangan negara sehingga laporan keuangan yang dihasilkan turut menjadi relevan dan dapat diandalkan.
5. Pemeliharaan dan Perbaikan, proses pemeliharaan dan perbaikan sangat penting namun perlu diperhatikan bahwa proses maintenance tanpa pemberitahuan lebih dahulu dapat mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak valid.

Kewajaran Laporan Keuangan, laporan keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang dihasilkan dari implemnetasi aplikasi SAKTI telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pusat sehingga laporan keuangan tersebut dapat dikatakan wajar menurut PP 71 tahun 2010.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, terdapat saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain :

1. Untuk kegunaan akademik Dalam kegunaan akademik, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi contoh kasus *riil* implementasi sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait penerapan sistem informasi akuntansi pemerintah terutama pemerintah pusat. Kompleksitas layanan perlu didukung oleh sistem informasi yang andal sehingga dapat menghasilkan layanan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan Akuntabilitas Kinerja Instansi, perlu diciptakan sistem informasi yang dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses penatausahaan dan pelaporan keuangan instansi.
2. Untuk kegunaan praktik Bagi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam implementasi aplikasi SAKTI. Hal penting yang harus segera dilakukan adalah berkoordinasi dengan pengembang aplikasi SAKTI pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat SITP.
3. Untuk penelitian lanjutan Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam terkait dengan modul-modul lain pada aplikasi SAKTI dengan memperluas objek penelitian tidak hanya pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, namun pada seluruh Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan Aplikasi SAKTI. Terlebih pada tahun 2022 implementasi SAKTI sudah diimplementasikan secara menyeluruh pada seluruh Kementerian/Lembaga. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan muncul proses bisnis unik lain pada Kementerian/Lembaga yang berpotensi menjadi kendala dalam implementasi Aplikasi SAKTI.

REVERENSI

Corry Margaretha Jayanti Gultom, Siti Nurwahyuningsih Harahap.

(2023). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah

Nasrudin, E., & Widagdo, A. (2020). Determinan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Pengaruhnya Terhadap Individu dan Organisasi. Jurnal Manajemen Perbendaharaan

Novelia, E. A. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Pengguna Pada Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat.

Oktasari. (2015). Teori implementasi kebijakan. (Jurnal Universitas Medan Area)

Pambudi, K. H., & Adam, H. (2015). Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Pendekatan *Delone and Mclean Information System Success Model*. Universitas Brawijaya.

Praisya Mumu, Lintje Kalangi, Peter M Kapojos. (2023). Analisis Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Daerah Kecamatan Langowan Barat Kab Minahasa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015

Sugiyono, (2007). Statistika Untuk Penelitian. Edisi revisi, Cetakan -12, alfabeta, Bandung.

Sofyan Syafri Harahap, (2004). Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Ramdany, Yusuf Setiawan. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Winarno, Budi. (2016). Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus Edisi & Revisi Terbaru. Yogyakarta

Hendri, W., Mariati. M., & Tamsil, T. (2020). Penerapan PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Inspektorat Kab. Banteng. Accounting Journal

Chandra, Angelina Hutomo, SE. (2015). Langkah-langkah yang diperlukan dalam siklus pengembangan suatu sistem informasi. Articles Management System

Badriah, Siti (2015). Implementasi : Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya